

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. PSN ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai aspek kehidupan nasional, termasuk ekonomi, infrastruktur, keamanan, pendidikan, lingkungan hidup, dan kesehatan. Dengan mengimplementasikan PSN, Presiden dapat mengarahkan sumber daya dan usaha mereka secara efektif menuju pencapaian tujuan jangka panjang yang sesuai dengan kepentingan Nasional. Serta Pengawasan Program Strategis Nasional (PSN) memegang peran kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Melalui pemantauan yang cermat, transparansi, dan akuntabilitas, pengawasan membantu memastikan bahwa sumber daya yang diinvestasikan dalam PSN digunakan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
2. Mekanisme pemberian sanksi kepada Kepala Daerah yang tidak menjalankan PSN sebelum Presiden melakukan pemecatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 harus memberikan kerangka hukum yang jelas dan transparan dalam menangani ketidakberhasilan Kepala Daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, penting bagi Kepala Daerah untuk mematuhi kebijakan nasional dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Melalui mekanisme ini, keadilan dan akuntabilitas dapat dipertahankan dalam sistem pemerintahan daerah, sementara kepentingan masyarakat tetap menjadi fokus utama.

3. Selain Presiden, terdapat beberapa pejabat lain yang memiliki Peran dalam memberhentikan Kepala Daerah yang tidak menjalankan PSN. Menteri Dalam Negeri, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memberikan rekomendasi, laporan, atau putusan yang menjadi dasar bagi Presiden untuk melakukan pemecatan terhadap Kepala Daerah yang tidak memenuhi tugas dan kewajibannya. Kolaborasi antara pejabat-pejabat ini penting untuk memastikan kepatuhan Kepala Daerah terhadap PSN dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.

B. SARAN

1. Memperkuat Pengawasan Terhadap Pelaksanaan PSN:

Penting bagi Pemerintah Pusat untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan PSN oleh Kepala Daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Kementerian terkait, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan instansi lainnya. Pengawasan yang *intensif* akan memungkinkan identifikasi lebih cepat terhadap ketidakpatuhan atau ketidakberhasilan pelaksanaan program dan memungkinkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

2. Penyusunan Pedoman dan Indikator Pelaksanaan PSN:

Pemerintah Pusat perlu mengembangkan pedoman dan indikator yang jelas mengenai pelaksanaan PSN. Pedoman ini dapat menjadi acuan bagi Kepala Daerah dalam menjalankan program-program tersebut. Indikator yang spesifik dan terukur juga perlu ditetapkan untuk memudahkan evaluasi terhadap

kinerja Kepala Daerah. Pedoman dan indikator tersebut dapat mengurangi ambiguitas dan meningkatkan akuntabilitas dalam melaksanakan Program-PSN.

3. Penguatan Kapasitas Kepala Daerah dalam Pelaksanaan PSN:

Pemerintah Pusat perlu memberikan dukungan dan pelatihan yang memadai kepada Kepala Daerah dalam memahami, merencanakan, dan melaksanakan PSN. Pelatihan tersebut dapat meliputi pemahaman mengenai kebijakan nasional, manajemen proyek, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya. Penguatan kapasitas ini akan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan efisien.

4. Penegakan Hukum yang Konsisten dan Adil:

Dalam kasus ketika Kepala Daerah terbukti secara serius melanggar ketentuan undang-undang terkait pelaksanaan PSN, Pemerintah Pusat perlu menegakkan hukum secara konsisten dan adil. Proses hukum harus dilakukan tanpa adanya *intervensi* politik atau kepentingan pribadi. Kepastian hukum dan keadilan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

5. Kolaborasi dan Komunikasi yang Efektif Antara Pemerintah Pusat dan Daerah:

Penting untuk membangun kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam pelaksanaan PSN. Keterlibatan yang aktif dari Kepala Daerah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program akan memperkuat pemahaman dan komitmen terhadap program-program nasional. Komunikasi yang terbuka dan saling mendukung akan membantu mengatasi hambatan dan meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan daerah.

6. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat:

Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan memantau pelaksanaan PSN. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, mereka dapat berperan dalam memastikan akuntabilitas Kepala Daerah dalam melaksanakan program-program tersebut. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat melalui sosialisasi program, *forum* partisipasi, dan mekanisme umpan balik yang efektif.

7. Evaluasi *Reguler* terhadap Pelaksanaan PSN:

Penting untuk melakukan evaluasi reguler terhadap pelaksanaan PSN. Evaluasi ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, lembaga independen, atau tim evaluasi khusus yang melibatkan pakar dan ahli terkait. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan terkait pemberhentian Kepala Daerah yang tidak memenuhi tugas dan kewajibannya dalam menjalankan program-PSN.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan pelaksanaan PSN dapat berjalan lebih efektif, Kepala Daerah dapat memenuhi tanggung jawab mereka dengan baik, dan tujuan kepentingan nasional dapat dicapai.